

Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal

Chanif Rizqiyati¹, Halim Dedy Perdana², Doddy Setiawan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Abstract. *This study aims at examining the determinants of capital spending rebudgeting in Indonesia local government. There are four independent variables in the study: local revenue (PAD), the remaining balance in the budget (SiLPA), the region size, and economic growth. Sample of the study consists of district/cities in Indonesia. There are 326 district/cities for 2 years (2012-2013) observations. Method? The result of the study shows that four independent variables: local revenue (PAD), the remaining balance in the budget (SiLPA), the region size, and economic growth positively affect capital spending rebudgeting in Indonesia local government. Therefore, the higher local revenue, the higher the remaining balance in the budget (SiLPA), the bigger size of local government and the higher economic growth will likely increase the capital spending rebudgeting.*

Keywords. *capital expenditure; economic growth; PAD; region; SiLPA*

Abstrak. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat empat variabel independen dalam penelitian ini: pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari kabupaten/kota di Indonesia. Ada 326 kabupaten/kota dari 2 tahun (2012-2013) pengamatan. Metodologi penelitian? Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat variabel independen: pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Oleh karena itu semakin tinggi pendapatan asli daerah, semakin tinggi sisa lebih perhitungan anggaran, semakin luas wilayah pemerintah daerah dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan meningkatkan perubahan anggaran belanja modal.

Kata kunci : Belanja Modal; Pertumbuhan Ekonomi; PAD; Luas Wilayah; SiLPA.

Corresponding author. Email: chanif.rizqiyati@gmail.com

How to cite this article. Chanif Rizqiyati, Halim Dedy Perdana, Doddy Setiawan .Determinan Perubahan Anggaran Belanja Modal.2019...*Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 83-96.

History of article. Received: January 2019, Revision: Maret 2019, Published: April 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i1.15140

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Adanya reformasi pada tahun 1998, mengakibatkan terjadinya perubahan politik dan administrasi. Salah satu bentuk adanya reformasi ini adalah dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang semula sentralisasi berubah menjadi desentralisasi (Kusnandar & Suswanto, 2012). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 pasal 1, menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan suatu kebijakan yang memberikan suatu kewenangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, serta menentukan alokasi sumber daya yang

dimiliki untuk digunakan dalam hal belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan keuangannya dapat dilihat pada bagaimana strategi yang diterapkan dalam penganggaran program dan kegiatan pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana publik, dan pelayanan kepada masyarakat (Abdullah & Junita, 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penyusunan APBD menjadi salah satu hal yang penting

dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Penetapan APBD sebelum tahun pelaksanaannya dimulai, membutuhkan adanya kompromi diantara para *budget actor* yang mempunyai preferensi yang berbeda (Abdullah & Rona (2015)). Selain itu, penetapan APBD mengakibatkan perlu adanya suatu penyesuaian atau revisi anggaran pada saat implementasinya.

Perubahan APBD merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian rencana keuangan (target) dengan perkembangan terkini yang terjadi. Penyesuaian ini dapat berimplikasi pada peningkatan anggaran penerimaan maupun pengeluaran. Setiap perubahan yang terjadi mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda satu sama lain. *Rebudgeting* atau perubahan anggaran dipengaruhi oleh tingkat *incrementalism* dalam proses penyusunan anggaran awal, serta faktor-faktor internal dan eksternal seperti politik, sifat organisasi, kondisi finansial, dan lingkungan sosial ekonomi (Annesi, Sicilia, & Steccolini, 2012).

Perubahan atas suatu APBD dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran. Perubahan anggaran dapat terjadi pada setiap komponen APBD. Pertama, perubahan atas pendapatan dapat disebabkan karena tidak terprediksinya sumber penerimaan baru pada saat penyusunan anggaran, perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah serta penyesuaian target yang didasarkan pada perkembangan terkini. Kedua, perubahan atas alokasi anggaran belanja dapat disebabkan karena adanya varian SiLPA, adanya pergeseran anggaran, serta adanya perubahan dalam penerimaan. Terakhir, perubahan atas pembiayaan, perubahan ini terjadi manakala asumsi yang ditetapkan semula harus direvisi (Abdullah, 2013).

Menurut Asmara (2010) perubahan atas suatu anggaran yang sedang berjalan merupakan suatu keniscayaan karena asumsi dan faktor - faktor lain yang *uncontrollable* pada kenyataannya tidak seperti yang diprediksi sebelumnya. Namun di lain pihak,

adanya perubahan anggaran ini adalah sesuatu yang diharapkan pemerintah daerah untuk menjamin program yang sedang berjalan dapat tercapai kinerjanya sesuai dengan apa yang ditetapkan sejak awal. Salah satu komponen anggaran yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah belanja modal. Perubahan belanja modal menjadi bagian penting dalam politik anggaran.

Saat ini alokasi belanja modal daerah diharapkan mengalami peningkatan dari 24 persen menjadi 30 persen terhadap APBD. Hal ini dikarenakan belanja daerah lebih banyak dialokasikan kepada belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang hanya 24 persen saja (www.kemenkeu.go.id). Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung dengan pendapat Gamawan Fauzi yang mengaminkan harapan adanya peningkatan alokasi untuk belanja modal daripada APBD dihabiskan untuk belanja pegawai. Apabila ada efisiensi, pengurangan perjalanan dinas, pensiun tidak perlu diganti, dan dana dapat dialihkan untuk belanja modal, sehingga jika belanja modal mendekati 50 persen, maka APBD akan semakin sehat (<http://lampost.co>).

Perubahan anggaran khususnya dalam pergeseran komposisi belanja merupakan suatu upaya yang masuk akal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada publik. Pergeseran ini dapat ditujukan untuk peningkatan investasi modal yang berupa aset tetap (Darwanto & Yustikasari, 2007). Semakin tinggi tingkat investasi modal maka semakin baik pula kualitas layanan kepada publik.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti tentang belanja modal, dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda-beda. Kusnandar & Suswantoro (2012) meneliti tentang pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Arwati & Hadiati (2013) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi

Jawa Barat. Abdullah & Rona(2015) meneliti tentang pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri, dan dana perimbangan terhadap belanja modal studi kasus atas perubahan anggaran kabupaten/kota tahun 2012 di Indonesia. Abdullah & Junita(2015) meneliti tentang bukti empiris pengaruh *budget ratcheting* terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Aceh.

Penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan. Atas dasar permasalahan yang ada, maka peneliti melakukan pengujian terkait dengan pengaruh dari PAD, SiLPA, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian mengenai perubahan anggaran belanja modal menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti di Indonesia, karena hampir setiap pemerintah daerah pasti melakukan suatu perubahan anggaran di setiap tahunnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kualitas penyusunan APBD dan meminimalkan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan melalui tindakan perubahan anggaran. Selain itu penelitian terdahulu belum memberikan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012-2013.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan dalam dunia bisnis dideskripsikan sebagai hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Jensen & Meckling(1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama

prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Teori keagenan merupakan teori yang berakar dari sinergi antara teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi (Darwanto & Yustikasari, 2007). Pada prinsipnya dalam teori ini terdapat hubungan kerja antara dua belah pihak, yaitu pemberi wewenang (prinsipal) dan penerima wewenang (Agen). Organisasi Sektor Publik tidak jauh berbeda dengan perusahaan pada umumnya, dimana di dalamnya terdapat dua pihak yang memiliki hubungan. Akan tetapi, dalam proses penyusunan dan perubahan anggaran daerah terdapat dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan pemilih atau rakyat.

Hubungan antara eksekutif dan legislatif yaitu, ketika eksekutif yang bertindak sebagai agen mempunyai masalah keagenan yang cenderung ingin memaksimalkan kepentingan pribadinya dalam pembuatan atau penyusunan anggaran APBD. Pihak eksekutif merasa mempunyai keunggulan informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain, sedangkan legislatif yang bertindak sebagai prinsipal akan cenderung melakukan kontrak-kontrak yang abstrak atau kurang jelas dengan pihak eksekutif, karena mempunyai *discretionary power* (keunggulan kekuasaan) bila dibandingkan dengan yang lainnya, sehingga dalam penyusunan anggaran, pihak legislatif dapat menitipkan proyek-proyek maupun kegiatan yang semata-mata untuk kepentingan pribadinya.

Kedua, hubungan antara legislatif dengan pemilih/rakyat. Legislatif sebagai agen mempunyai kewajiban membela kepentingan rakyat. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam proses penyusunan anggaran sering kali hal tersebut justru kebalikannya, legislatif mengabaikan kepentingan rakyat dan mereka lebih fokus untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam NegeriNo 13 tahun 2006 anggaran pendapatan

dan belanja daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD menjadi dasar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dalam waktu satu tahun anggaran.

Melalui APBD dapat dilihat bagaimana pemerintah daerah dapat menggambarkan sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi serta kegiatan atau program kerja yang akan dikerjakan. Jadi dalam suatu pemerintah daerah, APBD dapat menjadi salah satu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik, karena anggaran sektor publik dapat dipresentasikan dalam bentuk APBN maupun APBD (Mardiasmo, 2005).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang pemungutannya berdasarkan peraturan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dapat menjadi salah satu indikator tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dimana semakin tinggi rasio PAD dalam suatu pemerintah daerah terhadap total pendapatannya maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut (Kusnandar & Suswanto, 2012).

PAD menjadi salah satu indikator kemandirian suatu daerah, hal ini dikarenakan masing-masing daerah mempunyai PAD yang berbeda-beda disetiap daerahnya tergantung pada potensi sumber daya alam yang ada, serta kemampuan untuk menggali dan mengelolanya (Maryadi, 2014). Apabila PAD yang dimiliki semakin tinggi, maka hal ini dapat mempengaruhi besarnya anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Pasal 1, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SiLPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan (Abdullah & Rona, 2015). Perubahan atas besarnya jumlah SiLPA harus disesuaikan, karena dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja modal.

SiLPA dapat digunakan untuk mendanai kelanjutan kegiatan yang belum selesai dikerjakan pada tahun sebelumnya, dan dapat membiayai kegiatan baru yang sebelumnya belum dianggarkan dalam APBD Murni (Abdullah, 2013). SiLPA pada dasarnya merupakan suatu indikator yang dapat menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan SiLPA hanya akan terbentuk jika terjadi surplus pada APBD dan sekaligus menjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran (Balai Litbang NTT, 2008 dalam Kusnandar & Suswanto, 2012).

Luas Wilayah

Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Luas wilayah pemerintahan dapat diartikan sebagai jumlah ukuran dari besarnya wilayah suatu pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, kota atau bahkan provinsi, dan terkadang luas wilayah ini berkaitan erat dengan geografis suatu daerah tersebut (Maryadi, 2014).

Besarnya luas wilayah akan berbanding lurus dengan kebutuhan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik. Wilayah yang lebih luas akan membutuhkan sarana prasana yang lebih banyak, begitu juga sebaliknya dengan wilayah yang tidak begitu luas. Hal ini tentunya akan berdampak pada anggaran setiap daerah yang berbeda khususnya berkaitan dengan anggaran belanja modalnya.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang dapat diukur dengan besarnya produk domestik regional bruto (Darwanto & Yustikasari, 2007). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa besar tingkat kesejahteraan atau gambaran kegiatan perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan daerah lain tentunya berbeda, hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berbeda.

Pertumbuhan infrastruktur maupun pelayanan publik menjadi salah satu hal yang penting dalam pergerakan roda perekonomian. Infrastruktur yang baik dan fasilitas yang lengkap akan mempermudah, mempercepat kegiatan distribusi barang, akses transportasi mudah, maupun aktivitas ekonomi lain serta dapat meningkatkan daya tarik investasi kepada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik didukung dengan pertumbuhan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, sehingga lambat laun daerah tertinggal akan semakin berkurang, dan tingkat kesejahteraan akan meningkat.

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006, belanja modal adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 juga menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berbentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya.

Jumlah belanja modal pada anggaran tahunan semestinya relatif besar (Abdullah, 2013). Besarnya anggaran belanja modal suatu daerah dapat disalurkan ke dalam berbagai bentuk dari belanja modal yang tujuannya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan optimal. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan anggaran belanja modal benar-benar dimanfaatkan dengan tepat untuk rakyat, jangan sampai anggaran terserap untuk kegiatan yang kurang produktif. Terlebih menurut The Asian Foundation (TAF) rata-rata 65% dana APBD yang ada di seluruh daerah dibelanjakan untuk gaji pegawai (<http://keuda.kemendagri.go.id>), sehingga diperlukan adanya perubahan atau penyesuaian terhadap anggaran khususnya belanja modal agar APBD yang dibuat lebih baik dan sesuai yang semestinya.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

PAD merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk anggaran belanja modal suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan asli suatu daerah maka anggaran belanja modal suatu daerah juga akan tinggi.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari (2007), Kusnandar & Suswantoro (2012), (Arwati & Hadiati (2013), Mayasari, Sinarwati, & Yuniarta (2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal.

Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

SiLPA merupakan sisa lebih dari penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam kegiatan atau belanja tahun selanjutnya. Semakin tinggi SiLPA suatu daerah maka semakin tinggi pula anggaran belanja modal suatu daerah tersebut.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnandar & Suswanto (2012), Maryadi (2014) menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_2 : Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Luas wilayah mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Wilayah yang lebih luas sudah barang tentu membutuhkan sarana prasarana yang lebih banyak dan memadai agar semua sudut wilayah dapat merasakan akan pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini tentunya dapat mengurangi kesenjangan antar daerah. Akan tetapi, peningkatan sarana dan prasarana suatu daerah juga harus diimbangi dengan adanya dana atau anggaran yang khusus digunakan untuk belanja modal. Oleh karena itu, semakin luas suatu wilayah maka akan membutuhkan anggaran belanja modal yang lebih besar pula.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusnandar & Suswanto (2012) dan Maryadi (2014) menyebutkan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_3 : Luas wilayah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah menginginkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercapai tujuannya manakala didukung dengan pertumbuhan infrastruktur maupun fasilitas lain yang dapat membantu kegiatan perekonomian rakyat, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari rakyat daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lin & Liu (2000) menyatakan bahwa antara desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_4 : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012-2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang terbatas pada jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan baik itu karena satu-satunya yang memiliki atau memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2013). Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut.

Kriteria pertama, kabupaten/kota di Indonesia yang mempublikasikan APBD Murni, APBD setelah perubahan, laporan realisasi APBD di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012-2013.

Kriteria kedua, kabupaten/kota di Indonesia yang melaporkan anggaran dari sektor PAD,

SiLPA, luas wilayah, PDRB, dan belanja modal.

Kriteria ketiga, jumlah PAD, SiLPA, luas wilayah, PDRB, dan Belanja Modal tidak bernilai nol (0) atau minus (-).

Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data APBD murni, APBD perubahan, dan laporan realisasi APBD kabupaten/kota di Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, berupa data online yang ada di situs web www.djpk.kemkeu.go.id. Data luas wilayah bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat diunduh melalui situs web resminya, yaitu www.kemendagri.go.id. Data PDRB dapat diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, dan empat variabel independen. Perubahan anggaran belanja modal menjadi variabel dependen yang diukur dengan menghitung selisih antara anggaran belanja modal dalam APBD murni dengan anggaran belanja modal dalam APBD setelah perubahan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi. PAD dan SiLPA diukur dengan melihat besarnya realisasi dari pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran masing-masing kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan. Luas wilayah dapat diukur dengan melihat besarnya luas dari kabupaten/kota masing-masing. Pertumbuhan ekonomi diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen (Latan, 2014). Program aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini adalah SPSS 21. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$PBM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 SiLPA + \beta_3 LW + \beta_4 PDRB + \varepsilon$$

Keterangan:

PBM : Perubahan Belanja Modal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

LW : Luas Wilayah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Sampel

Berdasarkan pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, maka diperoleh sampel 326 kabupaten/kota selama 2 tahun pengamatan (2012-2013) penelitian.

Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk menggambarkan informasi yang didapatkan dari suatu data berkaitan dengan jumlah sampel yang digunakan, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Table 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Dev
PAD	326	9,80	11,86	10,8035	0,42445
SiLPA	326	8,30	12,54	10,8923	0,52738
LW	326	1,42	4,64	3,1746	0,71915

Variabel	N	Min	Max	Mean	Stad.Dev
PDRB	326	6,66	8,49	7,2935	0,28742
PBM	3226	7,75	11,94	10,3790	0,58306

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan maka dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sampel dari penelitian ini yaitu 326 kabupaten/kota di Indonesia dari total 2 tahun pengamatan. Tabel tersebut juga menggambarkan mengenai variabel pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki nilai minimum sebesar 9,80 pada Kabupaten Pakpak Bharat, dengan nilai maksimum sebesar 11,86 pada Kota Tangerang Selatan. Nilai rata-rata sebesar 10,8035 dan standar deviasi 0,42445.

Hasil pengujian variabel sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 8,30 pada Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan nilai maksimum sebesar 12,54 pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai rata-rata sebesar 10,8923 dan standar deviasi 0,52738.

Hasil pengujian variabel luas wilayah (LW) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 1,42 pada Kota Kupang, dengan nilai maksimum sebesar 4,64 pada Kabupaten Merauke. Nilai

rata-rata sebesar 3,1746 dan standar deviasi 0,71915.

Hasil pengujian variabel pertumbuhan ekonomi (PDRB) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 6,66 pada Kabupaten Maluku Tengah, dengan nilai maksimum sebesar 8,49 pada Kota Kediri. Nilai rata-rata sebesar 7,2935 dan standar deviasi 0,28742.

Hasil pengujian variabel perubahan anggaran belanja modal (PBM) menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki nilai minimum sebesar 7,75 pada Kota Sungai Penuh, dengan nilai maksimum sebesar 11,94 pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Nilai rata-rata sebesar 10,3790 dan standar deviasi 0,58306.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda yaitu:

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,647	0,418	0,411

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Tabel di atas menunjukkan nilai R^2 dan $Adj.R^2$ koefisien determinasi model persamaan regresi memiliki nilai $Adj. R^2$ sebesar 0,411 atau 41,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 41,1% dari nilai variabel dependen yaitu perubahan anggaran belanja modal (PBM) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Sisanya

sebesar 58,9% tidak dapat dijelaskan oleh persamaan regresi atau dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

Uji Statistik t

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik yang telah dilakukan dari

keempat variabel independen (PAD, SiLPA, LW, dan PDRB) yang ada dalam model penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik t

Variabel	Unstandardized		T	Sig
	Coefficients			
	B	Std.Error		
Konstan	0,064	0,798	0,080	0,936
PAD	0,306	0,075	4,057	0,000
SiLPA	0,476	0,061	7,781	0,000
LW	0,103	0,039	2,648	0,009
PDRB	0,206	0,096	2,152	0,032

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Hipotesis pertama: Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,057 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal pada taraf 5%, sehingga hipotesis pertama diterima.

Hipotesis kedua: SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,781 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal pada taraf 5%, sehingga hipotesis kedua diterima.

Hipotesis ketiga: Luas wilayah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,648 dengan signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikansi di bawah 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel luas wilayah memiliki pengaruh positif terhadap

perubahan anggaran belanja modal pada taraf 5%, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hipotesis keempat: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,152 dengan signifikansi sebesar 0,032. Nilai signifikansi di bawah 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal pada taraf 5%, sehingga hipotesis keempat diterima.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PBM = 0,064 + 0,306PAD + 0,476SiLPA + 0,103LW + 0,206PDRB$$

Uji Statistik f

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji signifikansi dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah hipotesis penelitian diterima jika probability value (*p-value*) < 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik f

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Reg	46,220	4	11,555	57,714	0,000
Res	64,267	321	0,200		
Tot	110,448	325			

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa model persamaan ini mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 hal tersebut lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi α 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PAD, SiLPA, LW, dan PDRB) dalam model ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu perubahan anggaran belanja modal (PBM).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

PAD berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Suswanto(2012), Darwanto & Yustikasari(2007), Mayasari et al(2014) yang menghasilkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Perubahan anggaran belanja modal yang terjadi di kabupaten/kota dipengaruhi oleh PAD masing-masing kabupaten/kota tersebut. Hal ini memberi makna bahwa penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tersebut.

Suatu perubahan anggaran yang dilakukan oleh suatu daerah kebanyakan akan meningkatkan jumlah anggaran dari anggaran yang ditetapkan sebelumnya, seperti halnya dengan perubahan anggaran belanja modal. Adanya perubahan anggaran belanja modal yang semakin meningkat diharapkan benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin untuk pelayanan publik seperti infrastruktur dan sarana yang lain, jangan sampai digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah yang dimiliki baik yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jumlah pendapatan daerah yang semakin tinggi, maka akan mampu mempengaruhi besarnya

anggaran belanja modal daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan akan meningkatkan pula infrastruktur yang ada di daerah tersebut. Selain itu, menurut Kusnandar & Suswanto(2012)juga menyebutkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka dapat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan ke dalam kegiatan maupun pengeluaran yang memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah.

Pengaruh SiLPA terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil yang didapatkan sejalan dengan hasil yang diperoleh oleh Kusnandar & Suswanto (2012), Maryadi(2014)yang menyatakan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Perubahan anggaran terjadi karena salah satu penyebabnya adalah belum pastinya jumlah SiLPA yang dianggarkan untuk tahun anggaran berjalan. Hal ini dikarenakan penetapan anggaran SiLPA tahun berjalan dilakukan sebelum pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya selesai, sehingga dengan perbedaan penetapan jumlah SiLPA tersebut, dilakukanlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja suatu daerah.

SiLPA dalam suatu tahun anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran sebelumnya. SiLPA ini dapat menjadi salah satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan maupun belanja tahun selanjutnya, termasuk bisa digunakan untuk anggaran belanja modal. Jadi dapat disimpulkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap perubahan belanja modal, semakin tinggi SiLPA maka semakin tinggi pula anggaran untuk belanja modal. Akan tetapi, menurut Kumorotomo(2010), besarnya SiLPA yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen para aparat dalam pelaksanaan anggaran publik masih rendah.

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Luas wilayah berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnandar & Suswanto (2012), Maryadi (2014) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mempunyai makna bahwa besarnya luas masing-masing wilayah atau daerah yang berbeda menjadi tolak ukur seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tersebut. Selain itu, luas wilayah yang dimiliki oleh setiap daerah dapat menunjukkan besarnya kebutuhan akan sarana dan prasarana yang harus disediakan.

Besarnya luas wilayah akan berbanding lurus dengan kebutuhan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik, dimana wilayah yang lebih luas akan membutuhkan sarana prasarana yang lebih banyak, begitu juga sebaliknya. Hal ini tentunya akan berdampak pada anggaran setiap daerah yang berkaitan dengan anggaran belanja modalnya, sehingga semakin luas wilayah suatu daerah maka dapat mengindikasikan semakin besar pula anggaran untuk belanja modal daerah tersebut, dan diharapkan masing-masing pemerintah daerah dapat dengan tepat mengalokasikan belanja modal untuk kemajuan daerahnya, serta tidak ada kesenjangan antar daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perubahan Anggaran Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tuasikal (2008), Arwati & Hadiati (2013), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal hal ini dikarenakan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu

daerah maka akan menuntut sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang lebih baik.

Adanya tuntutan tersebut maka pemerintah daerah diharapkan memberikan anggaran untuk belanja modal yang lebih besar, sehingga dengan adanya anggaran belanja modal yang lebih besar, maka pemerintah daerah juga harus benar-benar membelanjakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Jaya & Dwirandra (2014) yang menyebutkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD), sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), luas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan anggaran belanja modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 326 kabupaten/kota yang ada di Indonesia tahun 2012-2013. Semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran belanja modal. Hal ini dikarenakan apabila PAD dan SiLPA yang dimiliki setiap daerah dimaksimalkan dengan baik, maka akan meningkatkan jumlah pendapatan daerah, sedangkan luas wilayah yang semakin luas dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, akan membutuhkan anggaran belanja modal yang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan infrastruktur dari masing-masing daerah tersebut.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah setiap pemerintah daerah dalam membuat suatu anggaran, dapat benar-benar mengoptimalkan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki, serta dapat bijak dalam menggunakan anggaran, sehingga tidak

terjadi penyimpangan atau kecenderungan dalam menggunakan anggaran belanja modal yang digunakan untuk belanja pegawai, atau membelanjakan belanja modal tetapi tidak tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari masing-masing daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator atau pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan suatu anggaran khususnya terkait perubahan anggaran belanja modal.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan: pertama, dapat menambah periode pengamatan dan memisahkan antara kabupaten dan kota, sehingga dapat terlihat variasi antar tahun pengamatan dan dapat membandingkan bagaimana perubahan anggaran yang terjadi di kabupaten dan kota. Kedua, menambah variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal misalnya dengan menambah kebijakan pemerintah. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya pengukuran yang digunakan untuk variabel pendapatan asli daerah (PAD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dapat menggunakan data realisasi tahun sebelumnya (t-1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2013). Perubahan APBD. September 11 2015, <https://syukriy.wordpress.com/>
- Abdullah, S., & Junita, A. (2015). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. In *Asia Pacific Confrence On Accounting and Finance*.
- Abdullah, S., & Rona, R. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal: Studi atas Perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. In *Konfrensi Regional Akuntansi II Malang* (pp. 1–23).
- Annesi, P. E., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2012). Budgeting and Rebudgeting in Local Government-Siamese Twins. *Public Administration Review*, 72(6), 875–884.
- Arwati, D., & Hadiati, N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. In *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan Semarang* (pp. 498–507).
- Asmara, J. A. (2010). Analisis perubahan alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. In *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar* (pp. 1–25).
- Jaya, I. P. N. P. K., & Dwirandra, A. A. N. . (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kumorotomo, W. (2010). Akuntabilitas Anggaran Publik: Isu Politik, Prioritas Belanja dan SILPA dalam Alokasi APBD di Beberapa Daerah. In *Konferensi Administrasi Negara ke-3 Bandung* (pp. 1–22).
- Kusnandar, & Suswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Universitas Indonesia*.
- Latan, H. (2014). *Aplikasi Analis Data Statistik Untuk Ilmu Sosial Sains dengan IBM SPSS*. Bandung: Alfabeta.

- Lin, J. Y., & Liu, Z. (2000). Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*, 49(1), 1–21.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maryadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, 1–26.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganेशha*, 2(1).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2004a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. (2004b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142–154.

